

**OPTIMALISASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA BEJI KOTA BATU**

SKRIPSI

**(Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik)**



Disusun Oleh:

ADVENTUS MALO MUDA

2015210003

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

RINGKASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran paling penting, sebagai motor penggerak untuk pencapaian tujuan yang lebih baik. Keberhasilan Pemerintah Desa tergantung bagaimana kerjasama dengan BPD sebagai badan legislatif Desa yang mempunyai peran untuk menjalankan aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan yaitu mengetahui optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam meningkatkan pembangunan di Desa Beji Kota Batu, mengetahui faktor pendukung dan penghambat optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Beji Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yakni peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat tulis dan *recorder*. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan optimalisasi peran BPD dalam meningkatkan pembangunan di Desa Beji Kota Batu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Faktor yang mendukung dalam optimalisasi peran ini adalah Pemerintah Desa juga dari masyarakat. Faktor yang menghambat dalam optimalisasi peran ini adalah kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurang dan keterlibatan masyarakat masih kurang dalam memberikan informasi.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Optimalisasi Peran, Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Desa adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penyelenggaraan Negara, sebagai pelaksana pemerintahan Negara yang paling rendah dan berdekatan langsung dengan masyarakat serta memiliki siasat sebagai pelopor pencapaian cita-cita bangsa. skema yang dilakukan pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik bila penyelenggara Pemerintahan Desa dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Penyelenggara sistem apabila belum mampu menjalankan tugasnya, itu menjadi penghambat proses Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara sistem pemerintahan, seperti badan legislatif serta eksekutif. Sedangkan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah yang paling depan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perencanaan pembangunan Desa sangatlah penting dalam mewujudkan pembangunan Desa yang lebih baik. Ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa untuk keberhasilan membangun Desa. Oleh karena itu, Pemerintah desa mengambil langkah strategis untuk memegang aspirasi masyarakat melalui MUSREMBANG Desa. Pemerintah Desa Sebagai subjek pembangunan, tentu harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Artinya, pembangunan dapat memenuhi terlaksana sesuai keinginan masyarakat dalam menjalankan rancangan pembangunan desa yang akan disuarakan, sehingga masyarakat ikut serta secara maksimal.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa masyarakat harus terlibat dari setiap aspek. Apabila pimpinan (Kepala Desa) tidak berkerja dengan baik untuk menggerakkan masyarakat maka pelaksanaan setiap program agak sedikit mandek. Sebagai penata pembangunan jangan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakat dan pemerintahnya. Untuk itu, kepala Desa sebagai yang terdepan mempunyai wewenang yaitu mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan gagasan tentang pembangunan, masyarakat Desa harus mampu memberikan kontribusi penuh dalam menyampaikan aspirasinya dalam memenuhi keinginan bersama untuk menunjang pembangunan nasional. Setiap aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa ini segera menampal dalam rapat BPD segera disepakati dalam MUSREMBANGDESA dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah Desa dengan masyarakat. Sehubungan dengan ini, untuk menjalankan tugasnya Pemerintah Desa harus maksimal, sebab pemerintah Desa merupakan lembaga yang mempunyai kemampuan serta peran dalam pembangunan Desa. Hal ini akan menumbuhkan tindakan dan keinginan masyarakat akan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa adalah tempat atau ruang strategi untuk masyarakat Desa serta tempat membuat kebijakan di tingkat Desa, serta menjadi pengawas dalam pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai teman kerja Kepala Desa dapat berperan aktif untuk membangun Desa bersama Kepala Desa dan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan diperlukan adanya kegunaan BPD dalam mencari informasi aspirasi rakyat. Peran BPD sangatlah dibutuhkan agar ada

keputusan perencanaan pembangunan yang memprioritaskan masyarakat daripada individu atau kelompok. Dari uraian latar belakang, peneliti tertarik bermaksud meneliti dan dengan judul: “**Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Beji Kota Batu**”.

a.2. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang sebelumnya, Peneliti merumuskan persoalan yaitu:

- a. Bagaimana optimalisasi peran BPD dalam meningkatkan pembangunan di Desa Beji Kota Batu?
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat BPD dalam meningkatkan pembangunan di Desa Beji Kota Batu?

a.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui Optimalisasi Peran BPD dalam meningkatkan pembangunan di Desa Beji Kota Batu.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Optimalisasi Peran BPD dalam meningkatkan pembangunan di Desa Beji Kota Batu.

a.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Harapannya manfaat dari penelitian ini memberikan secara penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

- b. Manfaat Praktis

Bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang sedikit bermanfaat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan perannya sebagai mediator aspirasi masyarakat dan pembangunan di Desa Beji Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, S. 2016. *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali dan Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Aplikasi*. Depok: PT. Kharisma Putra Utama.
- Moleong, J. L. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT.Rosdakarya.
- Narimawati, U. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Agung Media.
- Thoha, M. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, S. P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Penerbit. CV. Alfabeta.
- Supriyanto, B. 2009. *Manajemen Tata Ruang*. Tangerang: Media Brilliant.
- Widjaja. 2013. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Divisi Rajawali Pers.

Jurnal:

- Bahren, W. 2014. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang). *Jurnal Ilmu Hukum. Untan*, Volume 2 Nomor 2.
- Pendi. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara. Unmul*, Volume 5 Nomor 3.